

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak ekonomi rakyat Indonesia. UMKM adalah usaha dengan jumlah modal tertentu yang dijalankan atau dikelola oleh individu maupun badan usaha yang beroperasi dalam lingkup perdagangan dengan karakteristik yang berbeda dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui kemampuan mengembangkan proses bisnis. Di era globalisasi yang berkembang saat ini, persaingan dalam dunia kerja menjadi lebih ketat. Persaingan tersebut juga dirasakan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan kalimat yang sering muncul di saat kita membahas tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi. Tingginya populasi usia produktif di Indonesia yang tak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan, mendorong orang Indonesia berlombalomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian masing-masing. Tidak heran semakin banyak bermunculan pelaku usaha sektor industri Usaha Kecil Menengah (UKM). Kriteria untuk UMKM sudah ditentukan pada aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah. Adapun klasifikasi UMKM dapat dibagi berdasarkan jumlah karyawan seperti yang disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Kriteria UMKM

No	Jenis Usaha	Kriteria
		Jumlah Karyawan
1	Usaha Mikro	Maksimal 10 orang
2	Usaha Kecil	> 10 orang – 49 orang
3	Usaha Menengah	> 50 orang – 150 orang

Sumber: <https://www.pengadaanbarang.co.id/2021/03/kriteria-umkm.html>

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi dan tuntutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, masalah krusial yang juga banyak dikeluhkan belakangan ini oleh para pelaku bisnis termasuk UKM munculnya berbagai hambatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan baru, khususnya di daerah. Peraturan-peraturan daerah ini sering kurang atau bahkan tidak memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang. Dalam implementasinya, birokrasi administrasi yang berbelit-belit dan penegakan hukum yang kurang tegas menjadi tantangan yang terus harus kita atasi ke depan. Berawal dari berbagai masalah, tantangan, dan hambatan tersebut di atas, maka dalam pengembangan koperasi dan UKM, pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu Mengembangkan UKM. Memperkuat Kelembagaan. Memperluas basis dan kesempatan berusaha. Mengembangkan UKM sebagai produsen, dan Membangun Koperasi.

Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur), menjadi harapan sejumlah masyarakat dalam mengembangkan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program yang mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif ini dibentuk untuk meningkatkan perekonomian warga.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, program ini tidak hanya memfasilitasi warga Jakarta yang ingin memulai usaha, tetapi juga yang sedang mengembangkan usahanya agar lebih baik dan dapat naik kelas. Ia menuturkan, Pemprov DKI gencar melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM.

Jakpreneur memfasilitasi dan membuka banyak akses bagi para pelaku usaha serta melibatkan pihak luar atau stakeholders lain untuk membantu mengembangkan usaha mereka dengan lebih mudah. Melalui 7 PAS (7 langkah Pasti Akan Sukses) yang terdiri dari fasilitasi Pendaftaran (P1), Pelatihan (P2), Pendampingan (P3), Perizinan (P4), Pemasaran (P5), Pelaporan Keuangan (P6), dan Permodalan (P7).

Selain untuk memperkuat perekonomian Jakarta, program ini juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Karena, pembinaan dan pengembangan UMKM di DKI Jakarta dapat mendukung terwujudnya diversifikasi ekonomi di berbagai sektor yang dapat membuat DKI Jakarta lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan krisis ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, para UMKM juga dibantu dalam menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses pasar dan pendanaan. Untuk akses pasar, Pemprov DKI memfasilitasi pemasaran produk binaan Jakpreneur melalui kegiatan bazar di berbagai lokasi.

UMKM memiliki peranan yang penting didalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan juga memiliki peran penting dalam mengatasi pengangguran. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan usaha mikro merupakan sumber untuk lapangan kerja dan peluang pendapatan. Beberapa tahun belakangan ini COVID-19 melumpuhkan ekonomi berbagai negara tidak terkecuali negara Indonesia, khususnya pada sektor UMKM yang memberikan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Sektor UMKM adalah Sektor yang mengalami dampak yang besar karena mengalami penurunan jumlah pembeli dan minat belanja masyarakat menjadi menurun. Dampak lain yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19 pada UMKM adalah menurunnya permintaan *in line* dan banyak nya pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga pendapatan masyarakat menjadi menurun (Habibah, 2020).

Pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk menjaga dan mendorong UMKM agar bisa tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi COVID-19 maupun pasca COVID-19. Pada Pasca Pandemi COVID-19 ini Pemerintah Republik Indonesia membuat program yang disebut program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN dibuat oleh Pemerintah bertujuan untuk mengurangi dampak yang dihasilkan oleh Pandemi COVID-19 terutama pada sektor perekonomian. Maka, sektor UMKM menjadi sektor

yang mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Indonesia dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Selain PEN Pemerintah Indonesia juga memiliki program yang bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM yang kerap terkendala oleh modal usaha, program ini bisa menjadi solusi pembiayaan yang cukup efektif atas kendala yang dialami pelaku UMKM dalam hal pembiayaan. Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan fasilitas permodalan terhadap anggota JakPreneur melalui e-form yang terintegrasi dengan Bank DKI. Pemprov DKI juga menyediakan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM dalam mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Para pelaku UMKM sangat membutuhkan pemodal dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengerti dan menguasai terkait persyaratan untuk mendapatkan kredit jangka panjang ataupun kredit modal kerja berdasarkan lembaga keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu persyaratan yang sangat dibutuhkan dalam pengajuan dana kredit tersebut. Bank membutuhkan laporan keuangan yang lengkap agar dapat mengetahui perkembangan usaha pemohon kredit, sehingga dapat memutuskan permohonan pengajuan kredit (Yulianti, 2019).

Hal ini juga disebutkan oleh Ediraras dalam Kusuma (2013) bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna dalam mengambil keputusan yaitu dalam hal (1) Dasar pertimbangan dalam pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi yang akan digunakan (2) Keputusan mengenai harga (3) Mengajukan permohonan pembiayaan ke bank (4) Untuk pengembangan usaha (5) Penambahan dan pengembangan sumber daya manusia serta penambahan usaha. Maka dari itu, laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam pengajuan dana kredit tersebut.

Kewajiban pencatatan akuntansi yang baik di Indonesia pada dasarnya sudah tersirat pada UU Tentang Usaha Kecil No. 9 Tahun 1995 dan UU perpajakan No. 2 Tahun 2007 Tentang Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (Pinasti, 2007). Perbedaan ilmu yang dimiliki para pelaku UMKM terkait pengetahuan akuntansi masih banyak ditemukan pada para pelaku UMKM,

pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menyediakan laporan keuangan yang memiliki informasi didalamnya merupakan hal yang susah dilakukan oleh pelaku UMKM. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha terutama terkait pengelolaan keuangan dalam usahanya.

Keterbatasan yang dimiliki pelaku UMKM mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak mengetahui bahkan mengenal tentang akuntansi, kurangnya kedisiplinan dan rajin dalam melakukan pembukuan akuntansi, kurangnya panduan akuntansi yang mudah dipahami, minimnya pelatihan yang diberikan baik dari perguruan tinggi atau dari instansi pemerintah dan tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi (Kurniawansyah, 2016). Pengelolaan keuangan yang baik juga harus diimbangi dan dibarengi oleh keterampilan akuntansi yang baik juga oleh para pelaku UMKM, para pelaku UMKM sudah seharusnya berfikir bahwa penerepan pencatatan dan pengelolaan keuangan didalam sebuah usaha adalah hal yang penting.

Menurut Ranupandojo dan Husnan (1995:77), Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya peningktana penguasaan teori dan keterampilan memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi

Jenjang pendidikan dari para manajer, karyawan maupun pemilik, merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi untuk menarik calon investor potensial bagi perusahaan. Ihsan (2011) menjelaskan jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran dan jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan pemilik, manajer dan karyawan akan membantu citra UMKM semakin baik di mata pihak lain diluar perusahaan.

Pengetahuan akuntansi juga memiliki andil besar dalam kemajuan usaha yang dikelola. Pengetahuan akuntansi adalah seperangkat ilmu tentang system informasi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Pengetahuan akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat ilmu yang tersusun tentang bagaimana pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian bersifat keuangan dengan cara berdaya guna dan bentuk satuan uang, penginterpretasi hasil proses tersebut berupa informasi kuantitatif yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar untuk memilih berbagai alternatif (Sitorus, 2017)

Pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik UMKM nantinya akan sangat bermanfaat dalam penggunaan informasi akuntansi. Pengetahuan akuntansi yang rendah juga akan menyebabkan penghambatan usaha untuk menjadi lebih besar dan para pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan apa yang akan diambil.

Banyak dari pelaku UMKM yang harus menutup usahanya hanya karena tidak ada pengetahuan akuntansi dalam membuat keputusan akuntansi. Banyak yang tidak mengiraukan tentang pemisahan antara uang pribadi dan uang yang sudah masuk ke dalam transaksi usaha sehingga menyebabkan tidak adanya laba atau keuntungan yang jelas dan modal usaha yang digunakan diawal. Hal itu bisa saja menyebabkan keuntungan yang bias dan jika terlalu lama keadaan itu dibiarkan akan membuat usaha berhenti di tengah jalan.

Kegunaan informasi akuntansi yang penting didalam membantu kemajuan usaha seharusnya sudah tidak ada pengecualian lagi untuk menggunakan informasi akuntansi tersebut didalam bisnis. Informasi akuntansi jelas sangat dibutuhkan perusahaan karena dapat menjadi dasar yang andal dalam pengambilan keputusan ketika mengalami permasalahan didalam bisnisnya. Hal-hal vital yang seharusnya dapat dijaga dan diselamatkan oleh perusahaan dapat terakomodir dengan baik apabila menerapkan informasi akuntansi yang baik karena sifatnya yang komprehensif dan mendetail dalam mengungkap semua aspek moneter dalam perusahaan.

dalam memberikan pelatihan kepada para anggota Jakpreneur, Pemprov DKI turut melibatkan pihak yang berkompeten. Dengan demikian, pelaku UMKM bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan bisnis mereka. Dalam hal ini, kami turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders lainnya. Mulai dari enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), komunitas kewirausahaan, asosiasi dunia usaha, asosiasi profesi, lembaga jasa keuangan, lembaga pemerintah dan otoritas terkait, badan usaha, perguruan tinggi, media, lembaga filantropi/filantropis, hingga lembaga internasional," papar Elisabeth.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, para anggota Jakpreneur juga mendapatkan program akselerator dan inkubator yang bertujuan untuk mengembangkan ide, model, serta mempercepat pertumbuhan bisnis. Pelaku UMKM juga diajarkan pemahaman dasar terkait keuangan dan perencanaan anggaran, sehingga bisa lebih maksimal dalam mengelola keuangan.

Holmes & Nichols (1988) menyatakan manajemen yang mengikuti banyak kursus ataupun pelatihan akuntansi cenderung menghasilkan lebih banyak informasi akuntansi dibandingkan dengan mereka yang kurang pelatihan. Menurut Solovida (2003), pelatihan akuntansi adalah pelatihan akuntansi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan luar sekolah maupun lembaga pendidikan tinggi, atau balai pelatihan departemen atau dinas tertentu. Pelatihan akan menghasilkan peningkatan didalam profesionalisme dan pengetahuan yang lebih tinggi didalam manajemen. Manajemen yang mengikuti pelatihan akuntansi cenderung lebih banyak menghasilkan informasi akuntansi statutori, anggaran dan tambahan daripada yang tidak mengikuti pelatihan akuntansi.

Ramadhani (2018) menyatakan pelatihan akuntansi sangat menentukan seberapa baik kemampuan seorang manajer akuntansi atau pemilik usaha terhadap penguasaan teknis akuntansi. Pemilik usaha, manajer usaha, dan karyawan yang semakin sering mengikuti pelatihan akuntansi, maka akan

semakin baik juga kemampuan pelaku usaha tersebut dalam menggunakan informasi akuntansi. Pelatihan akuntansi yang diikuti oleh pelaku usaha yang bertugas dalam mengolah informasi akuntansi, menjadi perhatian tersendiri bagi para pengambil keputusan. Pelatihan akuntansi yang diikuti para pelaku usaha menjadikan informasi akuntansi yang dihasilkan menjadi lebih terpercaya.

Berdasarkan hal tersebut maka, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Akuntansi, dan Pelatihan Akuntansi terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM (Di Wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur)”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat di uraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur?

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur?

1.4 Kegunaan Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Bagi mahasiswa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan informasi akuntansi pada pelaku UMKM.
2. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan menjadi hal yang bisa diperhitungkan bagi UMKM wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur dalam penggunaan informasi akuntansi pada usaha yang sedang dijalankan.
3. Bagi fakultas, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan peningkatan pengetahuan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memperbaiki penggunaan informasi akuntansi pada usahanya.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi pembaca tentang penerapan penggunaan informasi akuntansi pada sektor UMKM.